



RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

**DINAS SOSIAL KOTA JAMBI
TAHUN ANGGARAN 2024**

**Dinas Sosial Kota Jambi
Jln. Jend. Sudirman No. 156 Telp. 0741-24193 Fax. 0741 - 31682
JAMBI - 36128**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah S.W.T Tuhan Yang Maha Esa, dimana atas berkat Rahmad – Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini merupakan proses Penyusunan Rencana sebagai penjabaran dari sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Jambi 2024-2026.

Penyusunan Rencana Kerja ini adalah hal yang penting bagi keberhasilan suatu organisasi yang bertujuan sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yaitu pada Tahun 2024.

Kami sangat menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu tentunya mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif untuk kesempurnaan Laporan ini kedepan.



Jambi, Juli 2024
**KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA JAMBI**

YUNITA INDRAWATI, A.P M.P. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740607 199403 2 002

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	2
1.4 Sistematika Penulisan.....	3
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi.....	13
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi....	14
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RPD.....	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	21
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI	22
3.1 Telaahan terhdapa Kebijakan Nasional.....	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Jambi.....	23
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI	24
BAB V PENUTUP	31

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel. 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023.....	5
Tabel. 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi.....	13
Tabel. 2.3	Review terhadap Rancangan Awal RPD tahun 2024 Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024.....	17
Tabel. T-C.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024.....	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesejahteraan sosial bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, baik perorangan, keluarga, kelompok maupun masyarakat dalam rangka peningkatan harkat, martabat dan kualitas hidupnya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan memecahkan berbagai permasalahan sosial yang timbul, dengan mengedepankan prakarsa dan kreativitas masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya yang ada.

Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung meningkat, seiring dengan derasnya arus globalisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia, Sementara itu tuntutan masyarakat terhadap pelayanan social terus meningkat dan professional seiring dengan dengan Hak-haknya selaku warga Negara. Oleh sebab itu berbagai dampak positif dan negative dari persoalan sosial semakin meningkat.

Pembangunan kesejahteraan sosial ke depan akan semakin kompleks dan multi dimensional, karena masalah social berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, terutama masyarakat yang berada di lapisan bawah, yang dampaknya langsung berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti disintegrasi sosial, diskriminasi sosial, kesenjangan sosial, sistem nilai budaya bangsa (kesetiakawanan sosial) dan sebagainya.

Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah khususnya masalah kesejahteraan sosial diperlukan adanya perencanaan yang komprehensif, dengan membuat rencana berupa RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024 Dinas Sosial Kota Jambi sebagai acuan sehingga dapat mencapai sasaran yang diharapkan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 disusun berdasarkan landasan hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
- 3) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

- 4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- 7) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru;
- 8) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Di Daerah Propinsi, dan Kabupaten/Kota;
- 9) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;
- 10) Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
- 11) Peraturan Walikota Jambi Nomor 50 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Kota Jambi.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 ini merupakan salah satu dari serangkaian proses pekerjaan penyusunan program pembangunan daerah. Maksud disusunnya Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi tahun 2024 adalah untuk menentukan indikatif besarnya anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024.

Berdasarkan hal diatas, maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Jambi yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.
- b. Untuk Menentukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi .

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Sosial dan ini dituangkan kedalam 5 (Lima) Bab, secara ringkas sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud & Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial Kota Jambi
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi
- C. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Sosial Kota Jambi
- D. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

- A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial Kota Jambi
- C. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

TAHUN LALU (2022)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Perangkat Daerah Dinas Sosial terdiri dari satu sekretariat dan empat bidang. Hasil Renja Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2023 secara umum telah dilaksanakan dengan optimal dan beberapa kegiatan telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya hampir semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Secara rinci hasil kegiatan tahun 2023 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Jambi dan
Pencapaian Renstra Dinas Sosial s/d Tahun 2023 Kota Jambi

Nama Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Jambi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Renstra PD Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan S/D Dengan Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Rencana Perangkat Daerah S/D Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan Tahun Maret 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									

1.06	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial									
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	A	BB	7.098.601.978	6.690.737.048	94,25	6.472.100.910		
1.06.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP			90.290.800	88.638.800	98,17	58.035.250		
1.06.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan			4.534.358.392	4.386.853.626	96,75	4.504.987.628		
1.06.01 .2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			34.560.000	32.160.000	93,06	40.490.000		

1.06.01 .2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian			298.100.000	280.255.583	94,01	168.100.000		
1.06.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Umum			181.976.931	178.734.570	98,22	301.507.298		
1.06.01 .2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah			310.509.900	271.337.400	87,38	254.603.440		
1.06.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			615.781.600	490.745.767	79,69	520.843.600		
1.06.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pengelolaan Barang			1.033.024.355	962.011.302	93,13	623.533.694		

		Milik Daerah								
1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS			1.660.545.670	1.627.323.974	98,00	1.641.609.770		
1.06.02 .2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Izin PUB yang diterbitkan			46.111.000	45.200.800	98,03	28.955.910		
1.06.02 .2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan	Jumlah PSKS yang			1.614.434.670	1.582.123.174	98,00	1.612.653.860		

	Sosial Kabupaten/Kota	Daerah diberdayaka n								
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan			85.208.310	43.515.593	51,07	53.063.080		
1.06.03 .2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kota Jambi untuk dipulangkan ke Desa /Kelurahan Asal	Jumlah OT yang di pulangkan			85.208.310	43.515.593	51,07	53.063.080		
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh			1.291.283.5 81	1.197.671.2 65	92,75	1.272.929.00 3		

		bantuan sosial dan Di Layani								
1.06.04 .2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani			576.078.792	531.443.225	92,25	584.046.190		
1.06.04 .2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan			715.204.789	666.228.040	93,15	688.882.813		



	Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	an Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani								
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani			8.126.175.808	1.600.487.191	19,70	470.310.675		
1.06.05 .2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	jumlah anak terlantar			39.704.648	36.719.480	92,48	27.034.405		
1.06.05 .2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah	Jumlah Pengelolaan			8.086.471.160	1.563.767.711	19,34	443.276.270		

	Kabupaten/Kota	Data Fakir Miskin								
1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat Tanggap Darurat			737.859.710	693.637.640	94,01	700.486.562		
1.06.06 . 2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Bencana Alam dan Sosial yang ditangani			328.865.550	289.598.480	88,06	309.469.580		
1.06.06 . 2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Penyelengg araan Pemberdaya an Masyarakat terhadap			408.994.160	404.039.160	98,79	391.016.982		

		Kesiapsiaga an Bencana								
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Kinerja Dinas Sosial Kota Jambi diukur berdasarkan Tingkat pencapaian indikator sasaran atau yang disebut dengan indikator kinerja utama (IKU) serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan.

Tabel 2. 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Jambi

No	Indikator (IKU, SPM, IKK)	Angka/Nilai target/standar (IKU, SPM, IKK)	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
			2024	2025	2026	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Persentase Pelayanan Dasar Korban Bencana AlamSosial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	
2.	Persentase PMKS di Luar Panti yang Tertangani	100 %	100 %	100 %	100 %	85 %	85 %	100 %	



2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pelayanan jasa, Kota Jambi tumpuan bagi penduduk untuk menggantungkan hidupnya menuju kehidupan yang lebih baik. Pendetang dari luar daerah pun semakin meningkat, hal ini mengakibatkan bertambahnya penduduk kota sekaligus menambah permasalahan sosial dan Tenaga Kerja yang semakin semakin kompleks. Ke depan permasalahan ini perlu penanganan yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga peran serta masyarakat dan dunia usaha.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran merupakan bagian tidak bisa terpisahkan sebagai salah satu dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat, memerlukan perhatian ekstra keras dan penuh dengan kesabaran ekstra tinggi.

Karena itu pemerintah berada pada posisi kunci sebagai pihak yang harus melakukan pengaturan terhadap distribusi dari hasil sumber-sumber ekonomi.

Kedepan kita akan mengupayakan pengembangan program jaminan sosial dan bursa kerja oleh pemerintah pusat melalui Kementrian Sosial seperti perhatian terhadap pekerja sekaligus penyuluh sosial baik dari unsur masyarakat maupun pegawai negeri yang saat ini belum maksimal.

Isu-isu Strategis yang berkembang tentang Masalah Sosial adalah sebagai berikut :

- 1) Rendahnya kapasitas aparatur daerah, keuangan dan asset daerah serta implementasi reformasi birokrasi belum optimal.
- 2) Rendahnya tingkat kedisiplinan ketaatan masyarakat kepada peraturan perundang-undangan, norma agama serta nilai-nilai sosial budaya.
- 3) Meningkatnya jumlah PMKS seiring dengan pertambahan penduduk
- 4) Rendahnya akses dan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial
- 5) Belum terpenuhinya fasilitas Pelayanan dan Rehabilitasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti penyandang cacat, anak terlantar, anak jalanan, lansia terlantar, korban Napza, Orang dengan HIV / AIDS dan lain-lain

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dibidang Sosial Kota Jambi perlu upaya-upaya strategis yang secara menyeluruh dan terpadu meliputi perumusan kebijaksanaan Program operasional dan kegiatan-kegiatan.

Upaya strategis yang akan dilaksanakan dalam pembangunan Sosial tidak terlepas dari kondisi yang mendukung kegiatan dan faktor-faktor lain dari kegiatan dimaksud. Kondisi

yang akan diuraikan ini dilakukan melalui beberapa analisis yaitu analisis yaitu analisis lingkungan internal dan eksternal.

A. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL

➤ Kekuatan (Strength)

- a. Stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan terjaga dengan baik.
- b. Sinkronisasi dan Koordinasi antara Pemerintah, Kelembagaan Organisasi, Masyarakat dan Pelaku Dunia Usaha dalam mengatasi masalah-masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan
- c. Jumlah aparatur SKPD yang jumlahnya relatif cukup memadai untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Peningkatan peran / partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketenagakerjaan.
- e. Tersedianya Anggaran Dana yang bersumber dari APBD Kota Jambi untuk mendukung Program Kegiatan dan Tugas– tugas operasional.
- f. Terbentuknya struktur kelembagaan Dinas Sosial Kota Jambi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi

➤ Kelemahan (Weaknesses)

- a. Belum memadainya produktivitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kota Jambi.
- b. Masih banyaknya penduduk yang berada pada kelompok miskin.
- c. Ketersediaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum akurat seiring dengan pertumbuhan penduduk.
- d. Belum optimalnya implementasi Standar Pelayanan Minimal Aparatur Pemda yang berdampak pada efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
- e. Belum optimalnya dukungan dan peran serta aktif *stakeholders* daerah (dunia usaha-masyarakat) dalam pengelolaan dan penanganan masalah-masalah kesejahteraan social .
- f. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif dan kurang percaya diri.

B. ANALISIS LINGKUNGAN EKSTERNAL

➤ Peluang (Opportunity)

- a. Potensi sumber daya alam yang masih tersedia yang membuka peluang dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial melalui pola pendekatan secara kelompok dalam bentuk KUBE dan peningkatan Usaha Ekonomi Produktif;
- b. Keterlibatan dan peran serta aktif Orsos ditengah – tengah masyarakat & Lembaga masyarakat yang semakin baik dan bekerja sama dalam menangani masalah kesejahteraan sosial seperti yayasan – yayasan, LSM Orsos dan Karang Taruna sesuai fungsi sosialnya
- c. Pengelolaan Sumber Daya Personil dalam mendukung dan membantu tugas-tugas pelayanan Kesejahteraan sosial (Pegawai, Tagana, PSM,)
- d. Partisipasi dunia usaha dilakukan melalui program corporate social responsibility (CSR) merupakan implementasi dan tanggungjawab & Kepedulian perusahaan kepada masyarakat melalui kegiatan dan pelayanan kesejahteraan sosial.

➤ Ancaman (Threats)

- a. Tingkat kemiskinan penduduk yang relatif tinggi sehingga menimbulkan permasalahan sosial, seperti : Gepeng (gelandangan dan pengemis), Fakir Miskin, Anak terlantar, Anak Jalanan, Korban Narkoba, Korban HIV/AIDS, Keluarga Rentan, Lansia Terlantar & WTS;
- b. Kurangnya Pemanfaatan Potensi dan sumber daya pembangunan kesejahteraan sosial dan tenaga kerja,;
- c. Rendahnya Tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak luas terhadap masalah sosial lainnya seperti rendahnya semangat kerja, kurang kreatif , mandiri dan kurang percaya diri.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RPD

Tabel 2. 3 Review terhadap Rancangan Awal RPD tahun 2024 Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	6.780.775.148	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Jambi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	100 %	6.509.508.648	
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi	- Persentase Pemberdayaan	100 %	1.800.000.000	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Jambi	- Persentase Pemberd	100 %	1.800.000.000	

			Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS					ayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Menangani PMKS			
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		- Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 %	60.000.000	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		- Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak	100 %	60.000.000	

								Kekerasan			
4.	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	100 %	2.425.000.000	Program Rehabilitasi Sosial		Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dan dilayani	80 %	1.450.000.000	
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani dan	100 %	1.500.000.000	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang Dilayani	80 %	1.350.000.000	

			Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani					dan Persenta se Fakir Miskin yang Didata dan dilayani			
6.	Program Penanganan Bencana		Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	100 %	1.025.000.000	Program Penanganan Bencana		Persentase Penangana n Bencana saat tanggap darurat	80 %	1.025.000. 000	

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan daerah di Kota Jambi membuka akses yang luas kepada masyarakat dalam memberikan usulan pembangunan di daerahnya melalui mekanisme E-planing musrenbang. Sistem perencanaan tersebut dilaksanakan secara berjenjang dari level terbawah sampai tingkat Kota. Berdasarkan hasil musrenbang tingkat Kecamatan yang sudah dilaksanakan pada awal tahun 2022, tidak terdapat usulan kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui Dinas Sosial Kota Jambi dengan Program Indikator Kecamatan. Namun ada beberapa usulan dari hasil musrenbang kecamatan yaitu Non Pagu Indikator Kecamatan yang merupakan kegiatan rutin program kegiatan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Jambi yaitu pengusulan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pelatihan Bagi Disabilitas, Bantuan Kursi Roda, Alat Bantu Dengar, Tongkat Kruk, Etalase Jualan Sarapan, Kemeja Lapangan Karang Taruna, Sound Senam Lansia, Seragam Karang Taruna, Seragam Lansia, Pelatihan Menjahit, Pelatihan Pengolahan Makanan Tradisional.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang seyogyanya harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat; Pemerintah telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai pedoman pembangunan negara dalam kurun waktu tersebut. RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi dan program presiden. Dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: MEWUJUDKAN MASYARAKAT INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL, DAN MAKMUR MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI BERBAGAI BIDANG DENGAN MENEKANKAN TERBANGUNNYA STRUKTUR PEREKONOMIAN YANG KOKOH BERLANDASKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF DI BERBAGAI WILAYAH YANG DIDUKUNG OLEH SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING.

Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 Misi Pembangunan yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Tujuan yang akan dicapai dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan.
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.
3. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

TABEL
TUJUAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

No	Tujuan Dinas Sosial	Indikator Tujuan Dinas Sosial	Target Kinerja Tujuan Dinas Sosial Tahun 2024
1	Meningkatnya Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial.	Tingkat Pelayanan Kepada Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %
2	Meningkatnya Pelayanan Kepada Keluarga Miskin	Persentase Penduduk Miskin	100 %

	dan Orang Tidak Mampu.		
3	Meningkatnya Pelayanan Kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Persentase PMKS yang Tertangani	100 %

TABEL
SASARAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

No	Sasaran Dinas Sosial	Indikator Sasaran Dinas Sosial	Target Kinerja Sasaran Dinas Sosial
1	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase Pelayanan Korban Bencana Alam dan Sosial	100 %
2	Peningkatan Pelayanan Kepada Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	Persentase Pelayanan Keluarga Miskin dan Orang Tidak Mampu	100 %
3	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar PMKS Terlantar Diluar Panti	Persentase PMKS Terlantar Diluar Panti yang Tertangani	100 %

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Berdasarkan tujuan yang akan dicapai dan sasaran yang harus dilaksanakan serta permasalahan-permasalahan yang diprediksi dalam bidang perencanaan maka rencana dari program-program dan kegiatan- kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan Skala Prioritas RPD KotaJambi pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan OPD Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2024 dapat dijabarkan pada program kegiatan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - (2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - (1) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - (1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - (2) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - (3) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - (3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - (4) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - (1) Pengadaan Mebel
 - (2) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - (2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - (1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - (2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

- 1) Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang
- 2) Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (2) Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (3) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (4) Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - (5) Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

C. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBANTINDAK KEKERASAN

- 1) Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
 - (1) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

D. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - (1) Penyediaan Permakanan
 - (2) Penyediaan Sandang
 - (3) Penyediaan Alat Bantu
 - (4) Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- 2) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial
 - (1) Pemberian Layanan Kedaruratan
 - (2) Penyediaan Permakanan

E. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

- 1) Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
 - (1) Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
- 2) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - (2) Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - (3) Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

F. PROGRAM PENANGANAN BENCANA

- 1) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan SosialKabupaten/Kota
 - (1) Penyediaan Makanan
 - (2) Penyediaan Sandang
 - (3) Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - (4) Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan
 - (5) Pelayanan Dukungan Psikososial
- 2) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - (1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - (2) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL KOTA JAMBI

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 terdiri dari Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Jambi terdiri dari 6 Program, 17 Kegiatan 44 Sub Kegiatan dengan Total Rencana Anggaran sebesar Rp. 11.330.900.000,-

Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Recana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Lokasi
1.06.1	Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Kota Jambi	100 %	5.876.076.302	APBD		6.889.759.378	Kota Jambi
1.06.0 1.2.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Nilai AKIP	Kota Jambi	BB	42.484.800	APBD		66.891.350	Kota Jambi
1.06.0 1.2.01. 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Jambi	2 Doku men	37.084.800	APBD		49.978.800	Kota Jambi

1.06.0 1.2.01. 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Jambi	4 Lapora n	5.400.000	APBD		16.912.550	Kota Jambi
1.06.0 1.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Keuangan	Kota Jambi	100 %	4.024.236.961	APBD		4.982.802.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.02. 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Jambi	36 Orang /bulan	3.847.160.960	APBD		4.768.500.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.02. 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausaha an dan Pengujian/Verifikasi Keuang	Kota Jambi	12 Doku men	177.076.000	APBD		214.302.000	Kota Jambi
1.06.01 . 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Jambi	100 %	31.050.000	APBD		44.539.000	Kota Jambi

1.06.01. 2.03.00 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Jambi	12 Laporan	31.050.000	APBD		44.539.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertib Administrasi Kepegawaian	Kota Jambi	100 %	141.250.000	APBD		144.000.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Jambi	82 Unit	87.200.000	APBD		61.500.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.05. 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kota Jambi	12 Dokumen	4.050.000	APBD		16.500.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.05. 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Jambi	55 Orang	50.000.000	APBD		66.000.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.06	Kegiatan Administrasi UmumPerangkat Daerah	Tertib Pengelolaan Administrasi Umum	Kota Jambi	100 %	445.252.473	APBD		359.158.028	Kota Jambi

1.06.0 1.2.06. 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	20.098.932	APBD		16.804.630	Kota Jambi
1.06.0 1.2.06. 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	89.116.541	APBD		89.498.158	Kota Jambi
1.06.0 1.2.06. 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Jambi	1 Paket	17.427.000	APBD		40.830.240	Kota Jambi
1.06.0 1.2.06. 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Jambi	12 Laporan	318.610.000	APBD		212.025.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tertib Pengadaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100 %	230.263.469	APBD		225.000.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.07. 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Jambi	10 Unit	8.411.580	APBD		100.000.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.07. 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Jambi	15 Unit	221.851.889	APBD		125.000.000	Kota Jambi

1.06.0 1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Jasa Penunjang Urusan	Kota Jambi	100 %	472.518.600	APBD		502.662.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.08. 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Jambi	12 Laporan	2.000.000	APBD		7.150.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.08. 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Jambi	12 Laporan	204.070.000	APBD		200.000.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.08. 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Jambi	12 Laporan	268.518.600	APBD		295.512.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tertib Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Kota Jambi	100 %	486.950.000	APBD		564.707.000	Kota Jambi
1.06.0 1.2.09. 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Jambi	30 Unit	441,030,000	APBD		487.707.000	Kota Jambi

	Lapangan								
1.06.0 1.2.09. 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Jambi	50 Unit	45,920,000	APBD		77.000.000	Kota Jambi
1.06.0 2	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan Sosial Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Menangani PMKS	Kota Jambi	100 %	1.562.429.300	APBD		1.980.000.000	Kota Jambi
1.06.0 2.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin PUB	Kota Jambi	100 %	0	APBD		60.500.000	Kota Jambi
1.06.0 2.2.02. 0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Jambi	-	0	APBD		60.500.000	Kota Jambi

1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang diberdayakan	Kota Jambi	100 %	1.562.429.300	APBD		1.919.500.000	Kota Jambi
1.06.02.2.03.001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	68 Orang	484,834,300	APBD		561.000.000	Kota Jambi
1.06.02.2.03.002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	11 Orang	148,496,500	APBD		170.500.000	Kota Jambi
1.06.02.2.03.003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	100 Keluarga	717,617,500	APBD		770.000.000	Kota Jambi

1.06.02 .2.03.0 004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	36 Lembaga	178,731,000	APBD		330.000.000	Kota Jambi
1.06.02 .2.03.0 005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	5 Sertifikat	32,750,000	APBD		88.000.000	Kota Jambi
1.06.03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Jambi	100 %	27.500.000	APBD		66.000.000	Kota Jambi

1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase OT yang di pulangkan	Kota Jambi	100 %	27.500.000	APBD		66.000.000	Kota Jambi
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	150 Orang	27.500.000	APBD		66.000.000	Kota Jambi
1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial yang di layani	Kota Jambi	100 %	1.177.091.698	APBD		1.595.000.000	Kota Jambi

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kota Jambi @ Tahun 2024

1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti yang di layani	Kota Jambi	100 %	611.444.558	APBD		1.127.500.000	Kota Jambi
1.06.04.2.01.00.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	200 Orang	195.818.600	APBD		220.000.000	Kota Jambi
1.06.04.2.01.00.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	200 Orang	77.160.000	APBD		165.000.000	Kota Jambi

1.06.04.2.01.003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	37 Orang	141.425.158	APBD		220.000.000	Kota Jambi
1.06.04.2.01.008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	200 Orang	197.040.800	APBD		220.000.000	Kota Jambi
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti yang di layani	Kota Jambi	100 %	565.647.140	APBD		770.000.000	Kota Jambi

1.06.04. 2.02.0 002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	250 Orang	351.043.140	APBD		495.000.000	Kota Jambi
1.06.04. 2.02.0 003	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	200 Orang	214.604.000	APBD		275.000.000	Kota Jambi
1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Yang dilayani dan Persentase Fakir Miskin yang Didata dan dilayani	Kota Jambi	100 %	2.055.774.700	APBD		1.485.000.000	Kota Jambi
1.06.05. 2.01	Pemeliharaan Anak-Anak terlantar	Persentase anak-anak terlantar yang dilayani	Kota Jambi	100%	21.907.500	APBD		55.000.000	Kota Jambi
1.06.05. 2.01.0 001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	20 Orang	21.907.500	APBD		55.000.000	Kota Jambi

1.06.05 2.0 2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Data Fakir Miskin	Kota Jambi	100 %	2.033.867.200	APBD		1.430.000.000	Kota Jambi
1.06.05. 2.02.0 001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Kota Jambi	23000 Keluarg a	178.278.600	APBD		275.000.000	Kota Jambi
1.06.05. 2.02.00 03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	6882 Keluarg a	1.553.033.000	APBD		275.000.000	Kota Jambi
1.06.05. 2.02.00 04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	50 Orang	302.555.600	APBD		880.000.000	Kota Jambi

1.06.06	Program Penanganan Bencana	Persentase Penanganan Bencana saat tanggap darurat	Kota Jambi	100 %	632.028.000	APBD		1.127.500.000	Kota Jambi
1.06.06 .2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Bencana Alam dan Sosial yang ditangani	Kota Jambi	100 %	291.418.000	APBD		660.000.000	Kota Jambi
1.06.06. 2.01.00 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	250 Orang	127.680.000	APBD		275.000.000	Kota Jambi
1.06.06. 2.01.0 002	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	250 Orang	124.276.000	APBD		275.000.000	Kota Jambi

1.06.0 6.2.01. 0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	5 Unit	25.550.000	APBD		55.000.000	Kota Jambi
1.06.0 6.2.01. 0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	30 Orang	12.240.000	APBD		27.500.000	Kota Jambi
1.06.06. 2.01.00 05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	30 Orang	1.672.000	APBD		27.500.000	Kota Jambi
1.06.06 .2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana	Kota Jambi	100 %	340.610.000	APBD		467.500.000	Kota Jambi

1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	2 Kampung	41.500.000	APBD		82.500.000	Kota Jambi
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Jambi	50 Orang	299.110.000	APBD		385.000.000	Kota Jambi
TOTAL					11.330.900.000			13.143.259.378	

BAB V

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 Dinas Sosial Kota Jambi diharapkan dapat diinformasikan dan dikomunikasikan ke seluruh aparat dalam Organisasi Dinas Sosial Kota Jambi. Rencana Kerja ini memungkinkan seluruh anggota organisasi dapat memiliki kesamaan pandangan mengenai gambaran kinerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi dalam pelaksanaan tugas dan dijabarkan dalam program dan kegiatan selama tahun 2024.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Jambi ini merupakan rangkaian rencana program kegiatan untuk Tahun 2024 yang akan dilaksanakan Dinas Sosial Kota Jambi sebagai penjabaran Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pembangunan Nasional, hal ini merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Jambi. Untuk ini diharapkan Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kota Jambi yang direncanakan akan terlaksana dan terkoordinasi dengan baik serta dilakukan secara harmonis demi tercapainya tujuan strategis dalam kurun waktu tersebut akan senantiasa mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana ini, semoga dapat bermanfaat dan dalam menjalankan tugas kedepannya mempunyai pedoman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas yang diemban dalam kegiatan pembangunan Daerah Kota Jambi.



Jambi, Juli 2024
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA JAMBI

YUNITA INDRAWATI, A.P M.P. CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740607 199403 2 002